

TANGKOLEH PUTAI

Membangun Wawasan Berteologi Integralistik

**Pluralisme Dan Teologi Agama-Agama
(Memahami Paradigma Teologi Agama-Agama)**
Yance Z. Rumahuru

**M i m p i
(Kajian Exegese-Sosiologis Terhadap Mimpi Yusuf (Kej. 37:5-11) dalam perspektif Sumber E)**
Alce A. Sapulete

**Konsep Tuhan Dalam pembukaan UUD 1945
(Analisis Sosio – Historis)**
Weldemina Yudti Twery

Guru dan Perkembangan Konsepsi Media Pembelajaran
L.S. Joseph

Beberapa Petunjuk Untuk Memainkan Sebuah Partitur Piano
Sondang T. Tambunan

Pemimpin Yang Melayani dan Pelayan yang Memimpin
S. P. Suripaty

**Pelaksanaan Visi dan Misi Departemen Agama Melalui Pendidikan Perguruan Tinggi Agama
(Telaah Mengenai Pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia)**
R. Souhaly

Metode Musik Anak Menurut Zoltán Kodály
Branckly E. Picamussa

Bentuk Sapaan Bahasa Melayu Ambon di kota Ambon
Petrus J. Pattiasina

Layanan Bimbingan Belajar Yang Efektif
Herly J. Lesilolo

Meretas
Jalan Baru
Berteologi



JURNAL ILMIAH TANGKOLEH PUTAI

Membangun Wawasan Berteologi Integralistik

Tangkoleh Putai, adalah bahasa suku Wemale di Pulau Seram. **Tangkoleh** adalah suatu lembaga pendidikan adat yang diikuti oleh laki laki wemale yang disebut *pa Manawa*, (laki laki perkasa) Pendidikan ini dapat diikuti setelah seseorang telah melewati ritus inisiasi, (*Flawani*). Pendidikan tangkoleh biasa diselenggarakan di hutan dalam waktu yang tidak ditentukan. Peserta pendidikannya diajarkan berbagai hal, mulai dari keterampilan kerja sampai pada aspek-aspek moral-etis, atau penurunan alihan nilai-nilai adat. Sedangkan **putai** menunjuk pada tempat berlangsungnya pendidikan tadi. Kata ini tidak sebatas menunjuk pada suatu lokasi geografis, tetapi tempat yang sudah ditetapkan secara khusus. Oleh sebab itu lingkungan ini dipandang sakral dalam adat setempat.

Penetapan nama **TANGKOLEH PUTAI** sebagai nama Jurnal Ilmiah STAKPN Ambon didasarkan pada pertimbangan kultural dan ilmiah. Pertimbangan kultural artinya, pendidikan dimampukan mesti bertumpu pada basis-basis kebudayaan masyarakat setempat. Ia pun harus mampu menjadi suatu lembaga pengembangan kebudayaan, dan bahkan pasang surut perubahannya juga sinergis dengan pasang surut perubahan kebudayaan. Di samping itu, keberadaan lembaga STAKPN di Ambon harus mampu secara signifikan membawa perubahan dan perkembangan dalam budaya pendidikan di Maluku. Suatu budaya pendidikan yang membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur. Alasan ilmiahnya ialah karena lembaga STAKPN Ambon berpacu mengembangkan pendidikan yang memuja pada pembentukan suatu teologi integralistik, mencakup seluruh aspek kehidupan dan kependidikan itu sendiri.

Penanggung Jawab

R. Souhaly, SH (Ketua STAKPN Ambon)

Redaktur Ahli:

Prof. DR. I.Nyoman S.Degeng, M.Pd. (Universitas Malang)

DR. R.Z. Titahelu, S.H (Samratulagi Manado)

Prof. Dr.Ir.Suhardjono, M.Pd, Dip. HE. (Universitas Brawijaya)

DR. H.L Sapulete (UKIM)

R. Souhaly, SH (STAKPN AMBON)

Prof. DR. J.E. Lokolo, SH (UNPATTI)

S.E.M. Nirahua, SH, M.Hum (UNPATTI)

Prof. DR. A Watloty, S.PAK. M.Hum (UNPATTI)

Pemimpin Redaksi:

Drs. Nataniel Elake

Sekretaris Redaksi:

Christiana D. W. Sahertian, S.PAK, M.Pd

Redaksi Pelaksana:

Ny. H. Pesulima, S.Pd

Ny. F. Seitte, S.Si

Nn.F.L Elly, S.Pd

Editor:

Ny. A.Ch Kakiay, S.Ag, M.Si

Layout/Composing:

Christiana D. W. Sahertian, S.PAK, M.Pd

Administrasi:

Nn. J. Matital, S.Th

Bendahara:

Ny. Yenny Tomasila

Alamat Redaksi:

Kampus STAKPN Ambon, JL Halong Atas - Desa Halong Ambon, (0911) 353575

Catatan redaksi

Redaksi menerima tulisan berupa artikel, hasil penelitian, opini dan esai, adalah gagasan orisinal penulis, sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.

Naskah di ketik dengan spasi ganda, pada kertas kuarto, font Time New Roman (12), dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Panjang 10-12 halaman sebanyak satu eksemplar disertai disketnya (lebih lanjut silahkan baca petunjuk bagi penulis pada halaman belakang).

JURNAL ILMIAH TANGKOLEH PUTAI*Membangun Wawasan Berteologi Integrasistik***DAFTAR ISI**

Pluralisme Dan Teologi Agama-Agama (Memahami Paradigma Teologi Agama-Agama) <i>Yance Z. Rumahuru</i>	1-7
M I m p I (Kajian Exegese-Sosiologis Terhadap Mimpi Yusuf (Kej. 37:5-11) dalam perspektif Sumber E) <i>Alce A. Sapulete</i>	8-12
Konsep Tuhan Dalam pembukaan UUD 1945 (Analisis Sosio – Historis) <i>Weldemina Yudit Tiwery</i>	13-18
Guru dan Perkembangan Konsepsi Media Pembelajaran <i>L.S. Joseph</i>	19-21
Beberapa Petunjuk Untuk Memainkan Sebuah Partitur Piano <i>Sondang T. Tambunan</i>	22-26
Pemimpin Yang Melayani dan Pelayan yang Memimpin <i>S. P. Suripaty</i>	27-33
Pelaksanaan Visi dan Misi Departemen Agama Melalui Pendidikan Perguruan Tinggi Agama (Telaah Mengenai Pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Dalam masyarakat Multikultural di Indonesia) <i>R. Souhaly</i>	34-44
Metode Musik Anak Menurut Zoltán Kodály <i>Branckly E. Picanussa</i>	45-49
Bentuk Sapaan Bahasa Melayu Ambon di kota Ambon <i>Petrus J. Pattiasina</i>	50-60
Layanan Bimbingan Belajar Yang Efektif <i>Herly J. Lesilolo</i>	61-64

**PELAKSANAAN VISI DAN MISI DEPARTEMEN AGAMA
MELALUI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI AGAMA
(Telaah Mengenai Pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Dalam Masyarakat
Multikultural di Indonesia)**

R. SOUHALY, MH
Direktur STAKPN Ambon

Abstrak: Tulisan ini mengacu pada fenomena sosial masyarakat di Indonesia khususnya pada bidang pendidikan. Salah satu fenomena di masyarakat adalah kebanyakan warga hidup dalam ketegangan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Beberapa fenomena konflik di tanah air telah turut memperburuk citra keberagaman dari sisi kepercayaan di Indonesia. Diduga, sistem pendidikan turut mempengaruhi sikap seperti disebutkan. Dalam hal ini pendidikan masih tetap memegang peranan penting bagi pembentukan perilaku masyarakat. Untuk itu perlu dipikirkan model pengajaran dengan materi yang menjawab realitas masyarakat kita. Guna menemukan sikap toleransi dan saling percaya diantar umat beragama, penulis menawarkan perlu adanya kurikulum yang memuat materi multikulturalisme, disamping diperlukannya peningkatan sumber daya tenaga pengajar, serta peningkatan dan pemerataan infrastuktur antara wilayah-wilayah di Indonesia.

Kata kunci: multikulturalisme, transformasi, pendidikan

I. PENDAHULUAN

Fenomena sosial keagamaan di Indonesia dekade terakhir ini menunjukkan adanya pertentangan yang mengarah pada benturan dan konflik di antara sesama umat beragama. Sebagai contoh dapat disebutkan misalnya di Sanggau Ledo, Kalimantan Barat (1996/1997), Posso (1998/2000), Maluku (1999), Sampit, Kalimantan Timur (2000). Konflik pada berbagai daerah sebagaimana disebutkan memiliki karakter (akar dan pemicu) sendiri-sendiri. Walau begitu, umumnya konflik-konflik tersebut terjadi dengan berbagai motif seperti perebutan sumber-sumber alam dan penguasaan pasar (perdagangan) atau dapat disebut sebagai motif ekonomi, perebutan posisi-posisi struktural dalam birokrasi pemerintahan dan legislatif atau disebut sebagai motif politik maupun alasan lainnya seperti

pelaksanaan misi dan dakwah dengan perspektif yang sempit, untuk menjadikan umat beragama atau berkepercayaan lain memeluk agama pembawa misi dan pembawa dakwah; atau disebut sebagai motif keagamaan.

Berbagai persoalan sosial di masyarakat yang turut melibatkan umat beragama menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendasaran etika dan moral bagi seluruh komponen bangsa terutama untuk saling menerima, memahami dan menghargai kesamaan dan perbedaan di antara sesama pemeluk agama. Sudah tentu hal tersebut secara efektif dapat dicapai melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal dan dilakukan secara sistematis (terencana).

Departemen Agama Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu institusi yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia secara tegas telah merumuskan

capaian ideal yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan oleh Departemen Agama (Depag) melalui perumusan visi dan misinya. Sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2006, visi dan misi Departemen Agama dirumuskan sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama;
2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji;
5. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan;
6. Memperkokoh kerukunan umat beragama, dan;
7. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

Arah visi dan misi Departemen Agama sebagaimana disebutkan mengisyaratkan adanya suatu kehidupan umat beragama di Indonesia yang bertaqwa, aman dan damai dengan menghargai dan menerima hal-hal yang merupakan kesamaan maupun keberbedaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Sudah tentu hal ini dapat terwujud apabila setiap warga negara RI mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik pula. Yang dimaksudkan disini adalah pembentukan kepribadian dan penurunan nilai melalui kurikulum dan materi ajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar s/d Perguruan Tinggi.

Pada prinsipnya visi dan misi Depag ini memberikan isyarat bagi kita untuk menjadikan agama sebagai landasan etika, moral dan spiritual bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada gilirannya, akan menjadi kekuatan bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia Indonesia yang tinggi iman dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tinggi ilmu (memiliki pengetahuan, menguasai teknologi dan seni) dan tinggi pengabdian (dalam hal ini bagaimana mengaplikasikan iman dan ilmu ditengah kehidupan bermasyarakat).

Orientasi visi dan misi Depag seperti disebutkan memiliki hubungan yang erat dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU RI No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

Ayat 1 : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Ayat 2 : Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang beakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pengamatan penulis terhadap realitas pelaksanaan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum dan muatan materi pengajaran pada sekolah-sekolah belum memberikan porsi yang besar bagi upaya memahami orang lain. Melalui tulisan ini penulis mencoba untuk menggambarkan bagaimana peningkatan kualitas pendidikan keagamaan berdasarkan visi dan misi Depag RI untuk menjawab realitas kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia. Bahwa masyarakat bangsa Indonesia tidak saja plural (*plural society*)

tetapi juga multikultural (*multicultural sicity*). Realitas ini akan dilihat sebagai konteks sosial bagi peningkatan pelaksanaan pendidikan agama. Terkait dengan itu tulisan (*paper*) ini akan membahas konteks sosial pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia dan bagaimana implementasi visi dan misi Depag bagi peningkatant kualitas pendidikan agama. Didalamnya penulis mencoba untuk menelaah paradikma dan konsep pendidikan multikultural sebagai salah satu tawaran untuk mewujudkan visi dan misi Depag tersebut. Pilihan untuk pembahasan ini didasarkan pada pemikiran bahwa berbagai konflik atau pertikaian dan praktek kekerasan yang terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia cukup terkait erat dengan sitem pengajaran (pendidikan) agama secara umum yang belum secara signifikan memberikan pemahaman atas realitas dunia dan lingkungan disekitar (konteks sosial) kita. Secara khusus bagaimana lembaga pendidikan keagamaan meresponi realita kemasyarakatan kita di Indonesia yang majemuk baik dari segi budaya maupun agama.

Sebagaimana diketahui, UU RI No 20 tahun 2003 sebagai landasan hukum bagi pendidikan nasional memberikan penegasan terhadap prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini dalam hemat saya akan kita jumpai dalam konsep multikulturalisme yang mengisyaratkan suatu masyarakat majemuk namun memiliki kesejajaran tanpa adanya dominasi.

Untuk mengembangkan tulisan ini maka secara berurutan penulis akan membahas mengenai konteks sosial pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia serta implementasi visi dan misi Departemen Agama melalui pelaksanaan pendidikan agama. Adapun susunan penulisan adalah sebagai berikut: pertama, pendahuluan, kedua, pembahasan dan ketiga penutup.

II. PEMBAHASAN

A. KONTEKS SOSIAL PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA

1. Kemajemukan sebagai realitas pelaksanaan pendidikan agama

Indonesia sebagai negara yang majemuk atau tepatnya disebut multikultural dan multireligius merupakan sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Malah dapat disebutkan bahwa kemajemukan penduduk Indonesia merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat Indonesia untuk saling belajar satu dari yang lainnya dalam membina kehidupan yang harmonis bagi integrasi bangsa.

Bila dicermati dengan baik, tampak bahwa muatan kurikulum pendidikan secara umum dan pendidikan agama pada khususnya yang diselenggarakan di Indonesia selama ini belum menjawab realitas seperti disebutkan di atas. Pendidikan agama lebih diarahkan pada pembentukan dan pengembangan intelektual pada masing-masing pemeluk agama, bukan pada pembentukan nilai-nilai etika, moral dan spiritual kemanusiaan yang saling menyapa sehingga terbuka ruang untuk saling belajar dan memahami antar sesama pemeluk agama. Hasil dari pendidikan agama pada masa ini adalah masing-masing pemeluk agama bersikap eksklusif dan saling curiga. Tidak mengherankan bila model pendidikan agama semacam ini telah turut memberikan andil bagi terciptanya konflik dan kekerasan atas nama agama.

Belajar dari pengalaman di masa sebelumnya, bainya pelaksanaan pendidikan agama sekarang ini di formulasikan lagi dengan memperhatikan konteks kemajemukan yang dimiliki serta menggunakan model pendekatan yang lebih transformatif. Menurut pengamatan saya, pendidikan agama yang diterapkan selama ini maupun diskusi seputar agama-agama di tanah air lebih didominasi oleh model-model pendekatan Teologi atau Kalam.

Dalam pendekatan ini yang menjadi objek pembahasan pendidikan dan studi agama-agama adalah dogma atau aqidah dan naskah-naskah atau teks-teks suci keagamaan. Bagaimana realitas kemajemukan disikapi secara terbuka dan adil melalui pendekatan seperti fenomenologi agama misalnya, masih diabaikan dalam pengajaran dan studi agama-agama. Padahal menurut hemat saya setiap agama dalam penerapan ajarannya perlu memperhatikan konteks sosial masyarakat setempat.

2. Pendidikan Multikultural: Konsep Yang Mewujud

2.1. Konsep Multikultural

Sebelum melihat bagaimana konsep pendidikan multikultural, perlu ada penyamaan persepsi mengenai apa itu multikultural atau multikulturalisme. Melaluinya akan diketahui pula batasan pengertian mengenai masyarakat multikultural. Kata multikultural adalah bentuk kata sifat dari kata multikulturalisme. Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Suparlan (2002) melihat kebudayaan (*culture*) adalah masyarakat atau individu yang memiliki bahasa, sejarah, sistem kepercayaan, norma atau sistem moral dan tempat tinggal yang secara geografis sama. Selain itu terdapat perasaan kesamaan etnik yang berasal dari leluhur yang sama pula.

Menurut Suparlan, karena multikulturalisme merupakan sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Menurutnya, sebagai sebuah ide atau ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik dan

berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan.

Jay-Jay (1991) mengartikan multikulturalisme sebagai adanya pengakuan akan perbedaan atau kemajemukan kebudayaan yang mencirikan realitas setiap masyarakat. Bikhu Parekh (1997) menyebutkan bahwa istilah multikulturalisme memiliki tiga komponen. Pertama, segala yang dilakukan didasarkan pada budaya. Kedua, menunjuk pada suatu kemajemukan budaya dan ketiga, mengarah kepada gaya/cara tertentu untuk menjawab kemajemukan (perbedaan).

Konsep multikulturalisme merupakan wacana yang baru dalam masyarakat dibandingkan dengan konsep seperti pluralitas (*plurality*) dan keragaman (*diversity*). Sekitar tahun 1970-an gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan terus meluas ke wilayah lain.

Wacana multikultural di Indonesia mulai muncul ketika runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru. Dalam masa transisi dan maraknya gerakan reformasi terdapat berbagai wacana mengenai Indonesia baru. Melalui berbagai forum diskusi dan seminar, semakin disadari bahwa secara faktual bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Tahun 2001 bertempat di kota Yogyakarta, Perhimpunan Indonesia Baru dan Asosiasi Antropologi Indonesia mengadakan seminar dengan tema Menuju Indonesia Baru: *Dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural*. Akhir dari seminar itu, para peserta seminar menyadari bahwa konsep masyarakat Indonesia yang bercorak majemuk (*plural society*) saatnya dikaji kembali. Dalam hal ini, semakin disadari bahwa masyarakat multikultural (*multicultural society*) merupakan suatu bentuk yang dirasakan mampu menjawab perubahan zaman. Seorang fasilitator seminar, Parsudi Suparlan (Sosiolog UI) mengemukakan bahwa multikulturalisme

adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai suatu corak kehidupan masyarakat. (Zubaedi, 2004).

Masyarakat multikultural (*Multicultural Society*) mengasumsikan adanya perbedaan dan kesederajatan. Secara konseptual, *Multicultural Society* cenderung disamakan dengan *Plural Society*. Namun demikian menurut hemat saya, terdapat perbedaan yang tajam antara kedua konsep ini. Pada satu sisi *Multicultural Society* dan *Plural Society* sama-sama menekankan aspek kemajemukan. Tetapi pada sisi yang lain, didalam *Plural Society* terdapat perbedaan antar yang mayoritas dan yang minoritas, di mana yang minoritas tidak akan memiliki posisi sejajar dengan yang mayoritas. Hal ini kemudian mengarah kepada dominasi atas kelompok tertentu. Sementara *Multicultural Society* dengan penekanan pada kesederajatan, anti terhadap dominasi dan subordinasi individu maupun kelompok.

2.2. Perspektif Pendidikan Multikultural

2.2.1. Perspektif Historis

Pendidikan multikultural lahir dari interes politik, sosial dan ekonomi. Bila ditarik kebelakang, pendidikan multikultural memiliki hubungan dengan gerakan sosial warga Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktek diskriminasi oleh lembaga-lembaga publik di tahun 1960-an. Salah satu lembaga yang mendapat sorotan adalah lembaga pendidikan. Gerakan mereka ini tidak lain adalah gerakana yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Dari tahun 1960-an s/d tahun 1970-an para aktivi yang terdiri dari orang-rang tua dan para pemuda secara keras menuntut kepada lembaga pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan. Para aktivis juga menuntut agar ada kesempatan yang sama dalam bidang pekerjaan.

Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula munculnya konsep pendidikan multikultural.

2.2.2. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Multikultural.

Tahun 1980-an dianggap sebagai saat di mana muncul sekolah yang didirikan oleh para aktivis dan peneliti yang penyelenggaraannya didasarkan pada paradigma dan konsep pendidikan multikultural. James Benks merupakan seorang pioner dari pendidikan multikultural. Ia berjasa dalam membunikan konsep pendidikan multikultural menjadi ide persamaan pendidikan (Paul Gorski, 2003).

James A. Benks (1997) merumuskan tujuan pendidikan multikultural sebagai berikut :

Tujuan pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan. Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk membantu para siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang bebas dan demokratis. Pendidikan multikultural mengembangkan kebebasan, kemampuan dan ketrampilan dalam menerobos batas-batas budaya dan etnis agar dapat berpartisipasi dengan kebudayaan dan kelompok lain.

Lebih jauh menurut James A. Benks, substansi pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan sekaligus penyebarluasan gerakan inklusif dalam rangka mempererat hubungan antar sesama.

Sesuai prinsip pendidikan multikultural, aktivitas pembelajaran di sekolah disasarkan untuk memberi perhatian pada kompleksitas dinamis dari berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi manusia seperti fisik, mental, kemampuan, kelas, jender, usia, politik, agama dan etnisitas. Untuk itu langkah-langkah yang ditempuh guna mengembangkan model pembelajaran multikultural adalah sebagai berikut: pertama, guru/pengajar perlu menghilangkan sikap negatif yang dimiliki

(bila hal itu ada pada guru) atas realitas kemajemukan baik agama maupun etnis. Kedua, seorang pendidik atau pengajar dan murid atau pelajar perlu mengenal secara baik kondisi sosial kemasyarakatan agar akrab dengan masyarakat dan lingkungannya. Ketiga, seorang pengajar dan pelajar memilih materi yang sesuai dan menarik. Keempat, seorang pengajar dan pelajar secara bersama-sama menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan materi yang dipilih. Dalam hal ini, didasarkan untuk mengidentifikasi persoalan sosial yang berkaitan dengan agama, suku, kehidupan ekonomi, kemampuan, mental dan fisik. (Zubaedi, 2004).

2.2.3. Pendidikan Multikultural sebagai Tuls Humani

Pada bagian ini saya mencoba melihat hubungan konsep pendidikan multikultural dengan pandangan filsafat pendidikan Paulo Freire. Diketahui bahwa pendidikan multikultural menekankan upaya internalisasi dan sikap penerimaan serta penghargaan terhadap perbedaan agama, ras, suku, adat, praktek ritual dan perbedaan lainnya di dalam masyarakat; terutama dikalangan peserta didik. Adapun tujuan pendidikan multikultural sebagaimana disebutkan di atas adalah pendidikan untuk kebebasan. Rose Reissman (1994), merumuskan secara lebih rinci tujuan dari pendidikan Multikultural sebagai berikut: pertama, meningkatkan pemahaman diri dan konsep diri secara baik. Kedua, meningkatkan kepekaan dalam memahami orang lain. Ketiga, meningkatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami kemajemukan, interpretasi kebangsaan dan budaya yang sering kali bertentangan dalam memandang sebuah peristiwa, nilai dan perilaku. Keempat, membuka pemikiran pada saat merespon suatu isu, dan kelima, memahami latar belakang munculnya pandangan suatu pandangan dimasa lampau (kuno) menjauhi

pandangan stereotipe dan mau menghargai semua orang.

Dalam hemat saya, tujuan pendidikan multikultural seperti disebutkan, juga merupakan poin utama dari filsafat pendidikan Paulo Freire. Bagi Freire (Paulo Freire 2002), pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Filsafat pendidikan Paulo Freire memiliki pendasaran sosial yang kuat pada kehidupan nyata bahwa dimuka bumi ini terdapat sejumlah manusia yang menderita sedemikian rupa, sementara sebagian yang lainnya secara bebas menikmati jerih paya orang lain dengan cara-cara yang tidak adil, dimana kelompok yang menikmati ini justru bagian minoritas dari umat manusia. Persoalan seperti ini disebut oleh Freire sebagai "situasi penindasan". Bagi Freire, penindasan apa pun nama dan alasannya adalah tidak manusiawi, karena menafikan harkat kemanusiaan (dehumanisasi).

Kontras dari dehumanisasi yakni humanisasi (memanusiakan kembali manusia). Humanisasi merupakan satu-satunya pilihan bagi kemanusiaan, karena sekalipun dehumanisasi merupakan fakta yang tidak terbantahkan terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia namun dehumanisasi bukanlah suatu keharusan sejarah. Freire menegaskan bahwa fitra manusia sejati adalah menjadi pelaku atau subyek, bukan penderita atau objek. Freire sebagaimana dikutip oleh Mudji Sutrisno (2001) memandang humanisasi sebagai proses yang berjalan terus-menerus atau tiada hentinya. Ia berkeyakinan bahwa bila rakyat disadarkan, dipulihkan kebebasannya maka mereka akan mampu menentukan model kenegaraan yang pas untuk mereka. Dengan begitu hubungan dialog antara manusia sebagai subjek sudah harus dimulai sejak awal proses pembebasan. Di mana hubungan dialog itu sendiri adalah pembebasan.

Dengan mengacu pada pemikiran P.Freire, Mudji Sutrisno (2001)

menyebutkan, panggilan manusia adalah humanisasi maka dehumanisasi merupakan simpangan, deviasi dari panggilan itu. Simpangan-simpangan itu muncul dalam bentuk "penindasan" atau hubungan anti-dialog. Apa itu penindasan? Situasi di mana X secara objektif menghisap Y ataupun merintanginya mengungkapkan diri J sebagai subjek yang bertanggungjawab.

B. IMPLEMENTASI VISI DAN MISI DEPARTEMEN AGAMA MELALUI TRANSFORMASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Paulo Freire dalam buku terakhirnya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul *Pedagogi of Freedom* sebagaimana dikutip oleh Simon Oxley (2002) menyebutkan bahwa "...mengajar bukan mentranfer pengetahuan untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan menghasilkan atau mengkonstruksi pengetahuan." Pemikiran ini hendak menegaskan bahwa sering terdapat masalah antara sang pengajar (guru/dosen) dengan pelajar (siswa/Mahasiswa). Bahwa pengajar bukan semata-mata pentransfer pengetahuan dan nilai, juga bukan melulu sebagai fasilitator dari proses pendidikan. Melainkan guru dan murid memiliki tugas yang sama untuk menghasilkan pengetahuan.

Telah disebutkan sebelumnya, bagi Freire, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pengenalan tersebut bersifat objektif maupun subjektif. Objektivitas dan subjektivitas dalam pengertian ini tidak dapat dipertentangkan satu dengan yang lainnya karena dalam perspektif ini, kebutuhan objektif untuk merubah keadaan yang tidak manusiawi selalu memerlukan kemampuan/kesadaran subjektif untuk mengenali lebih dahulu keadaan yang tidak manusiawi yang terjadi secara nyata atau objektif. Dalam pengertian Freire, kesadaran subjektif dan kemampuan objektif adalah suatu fungsi yang *constant*

(ajeg) dalam diri manusia dalam hubungannya dengan kenyataan yang saling bertentangan yang harus dipahaminya. Hubungan dialektis sebagaimana dimaksud tidak memiliki pengertian, persoalan mana yang lebih benar dan mana yang salah. Untuk itu dikemukakan bahwa pendidikan harus melibatkan tiga unsur dalam hubungan dialektis yang *constant*, yakni: pertama, pengajar, kedua, pelajar atau anak didik, dan ketiga adalah realitas dunia. Aspek yang pertama dan kedua adalah subjek yang sadar (*cognitive*), sedangkan yang ketiga adalah objek yang tersadari atau disadari (*cognizable*). (Paulo Freire 2002).

1. Paradigma Pendidikan Agama: Transformasi versus Transmisi

Dalam pengamatan atas pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, khususnya lembaga pendidikan keagamaan saat ini, patut di sebutkan bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan kearah perbaikan sistem pendidikan di tanah air. Hal itu tampak mulai dari keseriusan pemerintah dalam melihat perbaikan sistem pendidikan dan kurikulum sampai kepada alokasi dana pendidikan yang setiap saat mengalami peningkatan. Tanpa maksud untuk mengabaikan kemajuan yang begitu berarti dalam dunia pendidikan terutama pendidikan agama, menurut hemat saya pendekatan pengajaran yang lebih menekankan aspek-aspek teologi atau kalam dan dokma atau aqidah perlu diberi porsi yang seimbang dengan pendekatan pengajaran yang humanis atau dalam istilah Freire, pemanusiawian dunia.

Mengacu pada arah capaian visi dan misi Depag sebagaimana disebutkan di atas menurut saya, pendidikan agama maupun pendidikan secara umum yang menggunakan simbol-simbol keagamaan mesti sanggup melakukan transformasi peserta pembelajaran sesuai dengan konteks mereka. Dalam hal ini lembaga-lembaga pendidikan keagamaan mesti mampu untuk membentuk manusia Indonesia yang

berbudi pekerti dan berakhlak baik, memiliki kesadaran terhadap realitas kemajemukan (kesadaran multikultural dan multireligius), memiliki sikap religiusitas yang baik serta memiliki kekuatan spiritualitas yang pro hidup (*pro-eksistensi*).

Alasan mengapa spiritualitas yang pro hidup tidak lain karena hidup dan kehidupan itu adalah *given* dan bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau makhluk lain. Untuk itu semua tindakan yang melawan hidup dan kehidupan adalah tindakan yang melawan pemberi hidup dan kehidupan itu. Sebagai umat beragama kita percaya bahwa pemberi hidup adalah Allah (Tuhan Yang Maha Esa). Jadi *pro-eksistensi* adalah keadaan atau kegiatan yang menyambut pemberian Allah dengan penghargaan yang sama nilainya dengan hidup dan kehidupan itu sendiri (S. Wismoady Wahono, 2001).

Menurut Wismoady Wahono, dalam *pro-eksistensi* semua kemampuan manusia dan alam diberlakukan untuk hidup dan kehidupan itu sendiri serta pelestariannya. Dalam kaitan itu terdapat lima (5) hal yang mesti dilakukan oleh manusia. Hal-hal itu adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, papan dan pelestarian lingkungan hidup. Semua hal ini adalah kebutuhan dasar makhluk hidup, termasuk manusia yang beriman ataupun yang tidak beriman, yang beragama maupun yang tidak beragama. Begitu mendasarnya kebutuhan ini sehingga setiap orang, golongan maupun kelompok, bahkan bangsa menganggap hal ini sebagai salah satu alasan dasar bagi semua wawasan dan kiproahnya.
- b. Dengan asumsi bahwa kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, hal kedua yang dibutuhkan semua orang, golongan, kelompok dan lain-lain adalah pemenuhan perberlakuan norma dan nilai yang, antara lain mencakup nilai-nilai dasar umum, harga manusia dan hak alam, hak azasi manusia dan keadilan bagi semua. Pemahaman ini diperlukan baik untuk

- c. Di Indonesia kita mempunyai landasan filosofis atau ideologis bersama untuk *pro-eksistensi*, yaitu Pancasila. Masalah utama Pancasila ialah bahwa pemberlakuannya cenderung fragmentaris dan kasuistik.
- d. Semua agama bertujuan untuk kebahagiaan hidup dan kehidupan, paling tidak untuk para pemeluknya sendiri. Tetapi perkembangan dan perjalanan sejarah menunjukkan bahwa tidak ada satu lagi agama yang hidup secara solider lepas dari pergaulan dengan agama-agama lain.
- e. Dengan *pro eksistensi* ini setiap dan semua umat beragama menemukan dasar dan motivasi yang kokoh untuk saling mendekatkan diri satu kepada yang lain, bahkan juga membangun persaudaraan yang sejati. Dalam visi dan misi bersama bisa dijabarkan dalam bentuk kegiatan bersama dan atau kerja bersama

Dalam pandangan Paulo Freire, sistem pendidikan harus menjadi kekuatan penyadar dan pembebas bagi umat manusia. Dalam hal ini, kesalahan suatu sistem pendidikan dapat berdampak pada peserta didik selaku manusia-manusia yang dasingkan atau tercabut dari realitas dirinya sendiri maupun realitas dunia sekitarnya. Paulo Freire mengkritik sistem pendidikan yang pernah ada dan mapan, yang diandaikan sebagai sebuah "bank" (*banking concept of education*) di mana pelajar diberi pengetahuan agar kelak ia dapat memberikan hasil berlipat ganda. Dalam hal ini anak didik adalah objek investasi dan sumber deposito potensial. Sedangkang guru adalah depositor atau investor. Pendidikan model ini lebih bersifat negatif. guru adalah subjek yang dianggap serba tahu dan memberikan informasi yang kemudian disimpan oleh pelajar/anak didik (sebagai subjek yang semula tidak tahu apa-apa). pengajar mengemukakan secara selektif informasi kepada pelajar yang pasif. Freire menentang konsep pendidikan "model perbankan" ini. Ia yakin bahwa pendidikan harus membebaskan, yaitu berupa tindakan untuk

mengetahui atau memahami dari pada mentranfer informasi. Proses belajar hendaknya tidak dikendalikan oleh pengaja (guru), tetapi merupakan tanggung jawab bersama pengajar dan pelajar di mana mereka semua tumbuh melalui proses dialog. Melalui perspektif ini yang akan terjadi adalah proses pendidikan dan pengajaran (pembelajaran) terjadi melalui pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing subjek, berupa konsep-konsep, nilai-nilai, harapan-harapan, dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dari pada berdasarkan kurikulum yang dipaksakan dari luar. Jadi bagi Freire, selalu merupakan pengalaman kolektif. Ini adalah proses pemberdayaan baik bagi komunitas maupun individu. (Simon Oxley 2002).

Paulo Freire menyusun daftar antagonisme pendidikan "gaya bank" sebagai berikut:

- 1) Guru mengajar, murid belajar atau diberi
- 2) Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa
- 3) Guru berpikir, murid dipikirkan atau murid tak diikutsertakan
- 4) Guru berbicara, murid mendengarkan
- 5) Guru mengatur, murid diatur
- 6) Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti
- 7) Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya.
- 8) Guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri
- 9) Guru mengacukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid
- 10) Guru adalah subyek proses belajar, murid obyeknya

Menurut M. Sutrisno (2002), kesalahan model pendidikan macam ini adalah: pertama, asumsi bahwa pengetahuan itu sesuatu yang padat, statis, selesai dipelajari, lalu selesai ditangan guru. Maka harus diberikan ke yang lain melalui pemberian. Tidak melihat dinamika pengetahuan, yaitu pencarian terus-

menerus. Kedua, proses mengetahui dipisahkan dengan realitas padahal proses mengetahui itu dialektis, yaitu manusia dan dunia, mandeg bila pengetahuan lalu dihafalkan dalam teori-teori karena proses keterlibatan dengan realitas berhenti. Bila ketrampilan-ketrampilan diberikan terpisah dari ketotalan praksis manusia, teknik menanam padi menjadi tidak cuman teknis tetapi juga soal kultural. Ketiga, asumsi keliru bahwa kegiatan pengetahuan dapat berlangsung dalam situasi anti-dialog: guru bertindak sebagai aktor sedangkan murid berlaku sebagai penonton.

Pelaksanaan pendidikan keagamaan dan pengajaran agama di Indonesia hingga kini menurut kesan saya yang sudah tentu subjektif (tidak sepenuhnya benar) masih bersifat transmisi dengan penekanan yang lebih pada pendekatan teologi atau kalam dan dokma atau aqidah. Bahwa aspek-aspek ini tetap dianggap penting, tetapi bukankah melalui lembaga-lembaga nonformal dan imformal pengetahuan mengenai teologi atau kalam dan dokma atau aqidah dapat diperoleh. Menjadi menarik bila pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama lebih bersifat tranformatif. Yakni, sebuah pendekatan yang berlaku adil dan terbuka terhadap realitas hidup masyarakat yang multikultural dan multireligius.

Apabila konsep pendidikan multikultural seperti dikemukakan singkat di atas dicermati dengan baik, terdapat sejumlah gagasan pokok bagi transformasi pendidikan agama kearah pencapaian visi dan misi Departemen Agama. Pasalnya, paradigma pendidikan multikultural diharapkan dapat menghapus stereotipe, sikap dan pandangan egois, individualistik dan eksklusif dikalangan peserta didik. Sebaliknya peserta didik diarahkan untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang konprehensif terhadap dunia dan lingkungan disekitarnya. Melalui pemahaman yang utuh atas realitas sebagaimana dimaksud maka dengan sendirinya akan tercipta suatu kondisi di

mana terjadi penerimaan dan penghargaan atas persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing individu maupun kelompok.

2. Beberapa langkah bagi implementasi Visi dan Misi Departemen Agama Pada Bidang Pendidikan

Melalui pemahaman dan pencermatan yang baik atas realitas masyarakat di Indonesia secara makro yang dikaitkan dengan tujuan pendidikan terutama melalui telaah singkat di atas, berikut ini saya menyampaikan beberapa gagasan mengenai implementasi visi dan misi Departemen Agama Republik Indonesia pada bidang pendidikan. Pertama sudah saatnya Departemen Agama memikirkan penyusunan kurikulum pendidikan multikultural yang penerapannya dimulai dari Sekolah Dasar. Dalam hal ini pada tingkat Sekolah Dasar perlu diberikan pelajaran budi pekerti dan pengenalan tentang kebermajemukan. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMU atau SMK) diharapkan terjadi pendalaman mengenai materi kebermajemukan suku bangsa, budaya dan agama. Pada tingkat Perguruan Tinggi perlu dipikirkan studi lintas agama dan budaya dan pemaknaan kehidupan yang majemuk baik dalam bentuk mata kuliah maupun program khusus untuk memberikan pengalaman konkrit perjumpaan lintas agama dan buaya.

Kedua, perlu meningkatkan Research dan kajian-kajian yang mengangkat wacana kebermajemukan budaya dan agama untuk menamba referensi dan memperkaya khasana kehidupan masyarakat kita mengenai realita kebermajemukan. Dalam hal ini terdapat kebutuhan untuk memperoleh tulisan dan atau buku sumber mengenai keariban lokal yang dimiliki oleh aneka suku bangsa dan agama di Indonesia, yang dapat diakses oleh semua orang. Ketiga, mengintensifkan pertemuan-pertemuan antar umat beragama dalam

bentuk kegiatan bersama untuk saling belajar satu dari yang lainnya. Hal ini dapat dilakukan baik pada level atas atau di antara para pemimpin institusi keagamaan maupun pada level bawah atau umat baik di wilayah pekotaan maupun di pedesaan.

Secara khusus bagi tenaga kependidikan (guru dan dosen) perlu dipikirkan pengembangannya baik dalam bentuk studi formal maupun kursus dan pelatihan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai agama dan budaya lain diluar dirinya serta pengalaman *cross cultural* (lintas budaya). Hal mana penting untuk membekali tenaga kependidikan dalam malakukan tranformasi melalui tugas-tugas mereka di Sekolah dan Perguruan Tinggi maupun dalam masyaralat secara luas. Hal lain yang perlu mendapat perhatian bersama terkait dengan implementasi visi dan misi Departemen Agama adalah ketersediaan infrastruktur secara merata pada berbagai wilayah di Indonesia.

III. PENUTUP

Perspektif filsafat pendidikan Paulo Freire maupun paradigma dan konsep pendidikan multikultural sebagaimana dikemukakan di atas, menurut hemat saya memberikan arah dan dasar bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, khususnya pendidikan agama di Indonesia. Hal mana dianggap relevan bagi konteks sosial di Indonesia karena: pertama, keduanya memberikan tekanan kepada pembebasan dan kesetaraan umat manusia. Kedua, dalam bidang pendidikan, filsafat pendidikan Paulo Freire maupun paradigma dan konsep pendidikan multikultural menekankan pada relasi pengajar dan pelajar dan dunia atau lingkungan sekitarnya sebagai subjek yang sama-sama salaing memberdayakan. Ketiga, masyarakat-bangsa Indonesia yang multi etnik, budaya dan agama memiliki keariban lalal (*local wisdom*) sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan

bersesama yang harmonis, sekaligus menjadi kekuatan kohesi untuk menghindari disintegrasi bangsa.

Berdasarkan pengamatan atas pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama di Indonesia, maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran agama di Sekolah-sekolah dan Universitas, perlu dipikirkan pendekatan yang khas (kontekstual transformatif) bagi pelaksanaan pendidikan dan studi-studi keagamaan.

Untuk mengimplementasi visi dan misi Departemen Agama dalam bidang pendidikan maka beberapa hal yang patut diperhatikan antara lain adalah: penyusunan kurikulum yang memuat materi multikulturalisme, peningkatan sumber daya tenaga pengajar, serta peningkatan dan pemerataan infrastruktur.

Daftar Rujukan

- Freire, Paulo 2002, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan pembebasan* Yogyakarta: Penerbit ReaD dan Pustaka Pelajar.
- Gorski, Paul 2003, *Multicultural Philosophy Series, Part 1: A Brief History of Multicultural Education*, dalam *The McGraw Hill Education Papers online*, The McGraw Hill Companies.
- Jay, David and Julia Jay 1991, *Dictionary of Sociology*, New York: Harper.
- Oxley, Simon 2002, *Pendidikan Oikumene Yang Kreatif: Belajar Dari Orang Lain*, Salatiga: Yayasan Binadarma.
- Parekh, Bhikhu "National Culture and Multiculturalism", in Kenneth Thompson (ed.) *Media and Cultural Regulation*. London-Thousand Oask-New Delhi: SAGE Publication in Association with the Open University. Pp. 163-194.
- Reissman, Rose 1994, *The Evolving Multicultural Classroom*, dalam *ASCD Piblikation*, New York, ASCD.
- Suparlan Parsudi 2002, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* Th. XXVI, No.69 (Sep-Des 2002), hl. 98-105.
- Sutrisno Mudji 2001, *Humanis, Krisis Humanisasi*, Jakarta: Penerbit Obor.
- Zubaedi 2004, *Telaah Konsep Multikulturalisme dan Implementasinya Dalam Dunia Pendidikan*, dalam *Jurnal Hermeneia*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2004), hl.1-19.